

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Upaya untuk menjaga netralitas ASN di Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah berjalan dengan baik dan konsisten. Dari sisi regulasi, aturan, dan pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), upaya-upaya untuk mewujudkan netralitas ASN di Kemhan telah diimplementasikan dengan jelas dan tegas. Namun dari hasil penelitian ini "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum 2024 di Kementerian Pertahanan" menunjukkan bahwa netralitas ASN di Kementerian Pertahanan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun berbagai regulasi dan aturan telah diterapkan dengan baik, masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan dalam mencapai netralitas tersebut. Intervensi dan himbauan dari TNI, serta budaya dan gaya komunikasi yang kental dengan hierarki dan loyalitas di Kementerian Pertahanan, menjadi faktor-faktor utama yang menghambat netralitas ASN. Hal ini sejalan dengan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, di mana birokrasi ideal harus didasarkan pada otoritas legal-rasional yang bebas dari pengaruh pribadi dan politik. Namun, ketika pimpinan instansi pemerintahan, seperti Menteri Pertahanan, terlibat dalam politik, prinsip-prinsip birokrasi Weberian menjadi sulit diterapkan. Keputusan dan arahan yang seharusnya berdasarkan aturan yang jelas dan impersonal sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Penelitian ini mengadopsi teori netralitas oleh B. Guy Peters yang menjelaskan bahwa fenomena netralitas ASN di kementerian Pertahanan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Peters. Teori netralitas oleh B. Guy Peters menyoroti bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pimpinan instansi pemerintah dalam politik. Netralitas birokrasi merupakan prinsip di mana ASN harus menjalankan tugas dan fungsi mereka secara profesional, tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik. ASN harus bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang ada, bukan karena tekanan atau kepentingan politis. ASN diharapkan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan akuntabilitas yang jelas. Profesionalisme berarti bahwa ASN memiliki

kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugasnya, sementara akuntabilitas berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Pengangkatan Berdasarkan Merit. Salah satu pilar penting dalam netralitas ASN adalah pengangkatan dan promosi berdasarkan prestasi (merit), bukan karena hubungan politik atau patronase. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang diangkat ke posisi tertentu adalah mereka yang benar-benar kompeten dan memenuhi syarat berdasarkan kinerja dan kemampuan mereka.

Ketidaknetralan muncul akibat keterlibatan Politik Pimpinan. Menurut Peters, ketika pimpinan suatu instansi pemerintah atau birokrasi terlibat dalam politik, netralitas instansi tersebut menjadi terancam. Alasan mengapa keterlibatan politik pimpinan dapat menyebabkan ketidaknetralan birokrasi adalah pengaruh kepentingan politik. Pimpinan yang terlibat dalam politik cenderung membawa kepentingan politik ke dalam keputusan birokrasi. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada hukum dan kebijakan yang ada bisa terdistorsi oleh agenda politik. Loyalitas Politik ASN di bawah pimpinan yang terlibat politik mungkin merasa tertekan untuk menunjukkan loyalitas politik mereka. Ini dapat mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pengangkatan dan Promosi Berbasis Politik. Pimpinan politik sering kali mengangkat atau mempromosikan ASN berdasarkan afiliasi politik daripada merit. Hal ini mengurangi profesionalisme dalam birokrasi dan mendorong budaya patronase. Budaya Organisasi berupa keterlibatan pimpinan dalam politik dapat mengubah budaya organisasi. ASN mungkin merasa terdorong untuk terlibat dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung pimpinan mereka. Ini mengikis netralitas dan integritas birokrasi. Loyalitas politik pejabat senior atau eselon yang sebagian besar memiliki latar belakang militer menambah kompleksitas dalam menjaga netralitas ASN. Dalam lingkungan yang sangat mengutamakan loyalitas kepada pimpinan, sulit bagi ASN untuk benar-benar bersikap netral, terutama jika pimpinan tersebut juga terlibat dalam kontestasi politik.

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun ada upaya keras dari Kementerian Pertahanan untuk menerapkan regulasi dan menjaga netralitas ASN, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Intervensi dari pimpinan

dengan latar belakang militer, budaya hierarkis, dan gaya komunikasi yang ada menunjukkan bahwa netralitas ASN di Kementerian Pertahanan belum sepenuhnya terwujud. Namun secara nonformal regulasi regulasi itu sendiri tidak diterapkan dan dijalankan dengan baik. Netralitas ASN merupakan wilayah abu abu bukan merupakan wilayah terang benderang. Bentuk ketidaknetralan dilakukan secara senyap dan tidak terekspos. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi dan aturan yang mengatur netralitas ASN di Kemhan sangat komprehensif. Peraturan Bersama Menteri, serta pedoman yang diterbitkan oleh KASN, berbagai edaran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan netralitas memberikan dasar hukum untuk menjaga netralitas ASN. Regulasi ini mencakup mekanisme seleksi, promosi, dan penempatan ASN yang berdasarkan pada prinsip meritokrasi, serta adanya sanksi tegas bagi ASN yang melanggar prinsip netralitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber mengenai birokrasi yang efisien dan rasional, di mana birokrasi yang ideal harus didasarkan pada otoritas legal-rasional yang menjamin transparansi dan objektivitas. Namun secara praktiknya regulasi dan aturan ini belum efektif dalam mengurangi netralitas ASN.

Dalam penelitian ini, wawancara dengan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti pengaruh loyalitas politik dan kepentingan individu, upaya untuk menjaga netralitas juga tetap terus diusahakan. Para pejabat mengakui adanya tekanan politik, terutama karena Menteri Pertahanan juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Namun, mereka menekankan bahwa tidak ada arahan langsung atau kewajiban untuk mendukung calon tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika pimpinan dalam sebuah lembaga menjadi salah satu calon presiden dan wakil presiden, maka loyalitas lembaga akan teruji, namun tetap kembali kepada pendirian dan komitmen sebagai ASN sebagai pelayan publik.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang signifikan dalam mewujudkan netralitas ASN di Kemhan. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh loyalitas politik pejabat senior/eselon yang sebagian besar berasal dari TNI. Gaya komunikasi dan budaya sosio-kultural di Kemhan berbasis pada disiplin militer dapat menciptakan tekanan bagi ASN untuk menunjukkan loyalitas kepada pimpinan yang juga mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2024.

Maria Uli Silalahi, 2024

**ANALISIS TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN 2024 DI KEMENTERIAN PERTAHANAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada arahan langsung atau kewajiban bagi ASN untuk mendukung calon tertentu.

Netralitas ASN sangat penting karena ada perbedaan konteks antara ASN tanpa jabatan dan ASN dengan jabatan atau posisi tertentu. ASN dengan jabatan memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung calon tertentu. Sebaliknya, ASN tanpa jabatan cenderung dimobilisasi sebagai pendukung atau pasukan dalam memenangkan calon tertentu. ASN dengan jabatan, terutama eselon tiga atau bahkan empat, memiliki anggaran, kewenangan, dan kekuasaan yang dapat digunakan untuk memobilisasi kegiatan atau aktivitas yang mendukung calon tertentu. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara itu, ASN biasa mungkin hanya berperan sebagai pendukung dalam kampanye, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap memihak.

Sulit untuk menyatakan bahwa perintah tidak berasal dari pimpinan atau atasan. Meskipun terdapat aturan dan regulasi yang jelas, ASN memiliki kecenderungan untuk mematuhi pimpinan mereka. Ketika mereka sangat patuh terhadap pimpinan, sulit bagi mereka untuk menolak perintah yang bertujuan tertentu, seperti mobilisasi sumber daya, program, atau kegiatan yang sedang dikerjakan demi kepentingan tertentu. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks, meskipun regulasi dan aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sudah jelas. Apabila terdapat pelanggaran dari pimpinan, seperti kehadiran dalam kampanye atau terlibat dalam kampanye secara fisik, maka ASN tersebut akan dikenakan sanksi.

Meskipun ada Badan yang mengawasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, akses untuk mengawasi hal-hal tersebut seringkali terbatas karena banyak kegiatan dilakukan secara tertutup. Akibatnya, sulit untuk membuktikan penyalahgunaan dana kampanye politik di pengadilan. Tanpa bukti yang jelas, seperti transfer dana atau pengakuan tertulis, sulit untuk menindak pelanggaran tersebut. Tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan netralitas ASN terjaga dengan baik. Pengaruh jumlah dan posisi jabatan TNI di Kementerian Pertahanan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan netralitas ASN. ASN yang bekerja di lingkungan yang didominasi oleh TNI mungkin

menghadapi tekanan untuk mengikuti arahan atau kebijakan yang lebih politis. Ini bisa merusak netralitas mereka, terutama dalam konteks pemilu.

Teori netralitas oleh B. Guy Peters menekankan bahwa untuk menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi, penting untuk menjaga ASN agar tetap netral dan bebas dari pengaruh politik. Keterlibatan pimpinan dalam politik adalah ancaman serius terhadap netralitas ini, karena dapat mengubah prioritas, proses, dan budaya dalam birokrasi. Oleh karena itu, menjaga jarak antara politik dan birokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa birokrasi dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan keadilan. Ini melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip etika administrasi publik dijaga dengan baik. Pimpinan di Kemhan juga harus secara aktif mendorong netralitas dan menegaskan bahwa ASN harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang objektif dan pelatihan yang terus-menerus bagi ASN memainkan peran penting dalam menjaga netralitas. Dengan fokus pada kinerja dan kompetensi, ASN lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkomitmen pada tugas negara. Hal ini mengurangi ketergantungan pada afiliasi politik dan memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional.

Lebih lanjut, menunjukkan bahwa penerapan sistem meritokrasi di Kemhan berperan penting dalam mewujudkan netralitas ASN. Sistem meritokrasi memastikan bahwa seleksi, promosi, dan penempatan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada afiliasi politik. Berdasarkan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, birokrasi ideal harus didasarkan pada otoritas legal-rasional yang menjamin efisiensi dan keadilan dalam administrasi publik. Weber menekankan pentingnya penerapan meritokrasi dan prosedur yang objektif dalam pengelolaan birokrasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa Kementerian Pertahanan telah mengadopsi prinsip-prinsip birokrasi Weberian melalui penerapan sistem merit yang memastikan bahwa

Maria Uli Silalahi, 2024

**ANALISIS TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN 2024 DI KEMENTERIAN PERTAHANAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

seleksi, promosi, dan penempatan ASN didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan afiliasi politik. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memainkan peran penting sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan sistem meritokrasi ini, menjamin transparansi dan objektivitas dalam pengelolaan ASN.

Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan teori netralitas yang dikemukakan oleh B. Guy Peters. Peters berpendapat bahwa netralitas birokrasi adalah salah satu prinsip dasar yang menjamin bahwa birokrat dapat menjalankan tugas mereka secara profesional tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Peters menekankan pentingnya pengaturan yang ketat dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas untuk menjaga integritas birokrasi (Peters 2001:219). Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa Kemhan telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN. Peraturan Bersama Menteri dan pedoman khusus tentang netralitas ASN dalam pemilu menyediakan kerangka kerja yang jelas dan tegas. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya netralitas juga dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN.

Hal ini diperkuat oleh pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki otoritas kuat dan independen. Selain itu, evaluasi kinerja yang dilakukan secara teratur dan objektif membantu memastikan bahwa ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa terganggu oleh tekanan politik. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terus-menerus juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun profesionalisme ASN. Para ASN merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkomitmen pada tugas negara daripada terlibat dalam politik praktis. Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Kemhan tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN tentang peran mereka sebagai pelayan publik yang netral. Kampanye etika dan disiplin yang kuat menambah lapisan perlindungan terhadap netralitas ASN, memastikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip netralitas ditangani dengan tegas.

Implikasi dan dampak netralitas politik ASN di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) pada Pilpres 2024 memiliki cakupan yang luas

Maria Uli Silalahi, 2024

**ANALISIS TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN 2024 DI KEMENTERIAN PERTAHANAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dan mendalam, mempengaruhi berbagai aspek dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Menjaga netralitas ASN adalah sebuah tantangan besar namun krusial untuk memastikan integritas dan profesionalisme birokrasi

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

Saran Dalam rangka mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum 2024 di Kementerian Pertahanan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Secara praktis, Kementerian Pertahanan perlu memperkuat mekanisme sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam proses pemilihan umum. Ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan reguler, seminar, dan diskusi internal yang melibatkan seluruh ASN. Selain itu, pengawasan internal perlu diperketat dengan memastikan adanya tim khusus yang fokus pada pemantauan perilaku ASN selama masa kampanye dan pemilihan.

Sanksi yang tegas juga perlu diterapkan bagi ASN yang melanggar netralitas, sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan regulasi terkait. Penting untuk mengintegrasikan konsep-konsep dari teori birokrasi oleh Max Weber dan teori netralitas oleh B. Guy Peters ke dalam strategi dan kebijakan yang dirancang. Prinsip-prinsip birokrasi yang mencakup otoritas legal-rasional, hierarki, aturan yang jelas, dan pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik perlu diterapkan secara konsisten dalam manajemen ASN di Kementerian Pertahanan. Selain itu, teori netralitas menekankan perlunya ASN bertindak secara independen dan netral dalam proses politik, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak politik tertentu. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini dalam praktik dan kebijakan sehari-hari, Kementerian Pertahanan dapat memperkuat fondasi netralitas ASN dan memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum 2024 dengan integritas dan transparansi yang tinggi.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

Diperlukan upaya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut bagi para peneliti yang tertarik untuk menyelidiki topik yang sama, namun dengan pendekatan teori dan sumber daya yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dari

berbagai perspektif yang beragam. Penelitian-penelitian berikutnya diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya dengan melibatkan beragam sumber daya dan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga diharapkan mampu meliputi ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akan semakin signifikan dan berkelanjutan.